

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Produktivitas masyarakat semakin terlihat di era global, yang mana sebagian masyarakat terlibat dalam bisnis di berbagai bidang. Keterlibatan masyarakat dalam dunia bisnis yaitu dengan mendirikan usaha dari mulai skala kecil, menengah, hingga skala besar. Usaha skala mikro merupakan usaha yang paling dominan dibanding skala lainnya. Melansir dari situs resmi Databooks, ASEAN Investment Report mengungkapkan jumlah usaha mikro mencapai 63.955.369 unit pada 2021 atau berkontribusi 99,62% dari total unit usaha di Indonesia, sedangkan usaha skala kecil dengan kisaran omzet Rp 2 – 15 miliar per tahun hanya menyumbang 0,3% dari jumlah UMKM yang tercatat sejumlah 193.959 unit.

Indonesia memiliki jumlah UMKM terbanyak di antara negara anggota ASEAN lainnya, dan disusul oleh negara Thailand dengan jumlah UMKM sebanyak 3,13 juta unit. Dengan demikian, keberadaan UMKM di Indonesia sangat diperhitungkan, karena dapat menyerap sebanyak 97% tenaga kerja, menyumbang 60,30% pada Produk Domestik Bruto, dan juga berkontribusi sebanyak 14.4% terhadap ekspor nasional. Hingga saat ini, UMKM terus berkembang di Indonesia dalam berbagai bidang usaha. Perkembangan UMKM dalam 4 tahun terakhir dapat ditinjau dari gambar berikut.



Data UMKM 2018-2023

Tahun	2018	2019	2020	2021	2023
Jumlah UMKM (Juta)	64.19	65.47	64	65.46	66
Pertumbuhan (%)		1.98%	-2.24%	2.28%	1,52%

*Diolah dari berbagai sumber



Gambar 1.1 Pertumbuhan Jumlah UMKM 2018 - 2023

Sumber: Indonesian Chamber of Commerce of Industry (KADIN Indonesia)

Melihat perkembangan zaman dalam era global tersebut, koperasi diharapkan untuk terus berinovasi dalam bidang usahanya, agar dapat turut serta bersaing pada ranah yang lebih luas. Tidak hanya itu, koperasi diharapkan mampu memberdayakan berbagai Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang terdapat di Indonesia, mengingat UMKM berkontribusi tinggi dalam pertumbuhan ekonomi, karena UMKM dapat menyerap hingga 97% dari total tenaga kerja.

Hal tersebut selaras dengan peran dan fungsi koperasi yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Bab 2 Pasal (4), yaitu:

“Mengembangkan potensi dan ekonomi anggota dan masyarakat, berupaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia, memperkokoh perekonomian rakyat, mengembangkan perekonomian nasional, serta mengembangkan kreativitas dan jiwa berorganisasi pelajar bangsa”.

Koperasi berusaha mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi. Koperasi dituntut berperan aktif dalam membangun dan mengembangkan potensi individu anggotanya, serta membentuk kehidupan ekonomi yang demokratis. Ciri

koperasi yang meliputi kekeluargaan, kebersamaan, keterbukaan, dan demokrasi menjadi landasan utama dalam keberlangsungan praktik usaha koperasi.

Merujuk pada *International Cooperative Alliance* (1995), koperasi adalah badan usaha yang dimiliki bersama dan dikendalikan secara demokratis. Definisi tersebut mengindikasikan bahwa koperasi merupakan kumpulan orang, yaitu anggota koperasi yang memiliki identitas sebagai pemilik koperasi. Oleh karena itu, anggota koperasi harus mempunyai rasa kepemilikan kepada koperasi dan berhak untuk memberi saran serta diikutsertakan dalam pengambilan keputusan agar esensi demokrasi dalam koperasi tidak hilang.

Koperasi sebagai badan usaha dapat bergerak dalam sektor usaha yang terbagi menjadi dua, yaitu sektor riil dan sektor keuangan (finansial). Sektor riil dalam koperasi mencakup jenis koperasi konsumen, koperasi jasa, koperasi produsen, dan koperasi pemasaran. Pada sektor keuangan terdapat jenis koperasi simpan pinjam. Mengingat masyarakat yang sebagian besar memiliki usaha mikro untuk pemenuhan kebutuhan hidupnya, perlu adanya wadah untuk menaungi serta mendorong kemajuan UMKM yang dimiliki Koperasi produsen merupakan koperasi yang memiliki anggota-anggota yaitu para produsen.

Berdasarkan fakta atas tingginya keberadaan UMKM di Indonesia, tentu hal ini memicu persaingan antar usaha. Masyarakat akan kehilangan pendapatan apabila UMKM yang dimilikinya tidak mampu bertahan di tengah ketatnya persaingan antar industri. Masyarakat, terutama pelaku UMKM memerlukan wadah untuk menyongsong keberlanjutan usaha yang dimilikinya. Oleh karena itu,

koperasi produsen dapat berperan menjadi wadah dan sosok yang memberdayakan serta mendorong keberlanjutan dan perkembangan usaha para pelaku UMKM dengan menarik pelaku UMKM tersebut menjadi anggota koperasi.

Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan provinsi dengan jumlah UMKM terbanyak kedua di Indonesia. Tercatat bahwa jumlah UMKM di provinsi tersebut adalah sebesar 342.586 unit di tahun 2023. Pelaku UMKM yang mendominasi jumlah tersebut yaitu dari Kabupaten Bantul (91.775 unit) dan Kabupaten Sleman (86.129 unit). Mengingat persaingan antar UMKM yang terus meningkat, maka diperlukan peran koperasi produsen untuk menunjang perkembangan usaha anggotanya.

Tabel 1.1 Perkembangan Jumlah Koperasi Produsen 2020 - 2023

Tahun	2020	2021	2022	2023
Jumlah Koperasi Produsen (Unit)	197	197	202	200

Sumber: Dinas Koperasi dan UMKM Daerah Istimewa Yogyakarta

Berdasarkan Tabel 1.1, jumlah koperasi produsen di Daerah Istimewa Yogyakarta cenderung stagnan dalam 4 tahun terakhir, dan mengalami penurunan dari tahun 2022 ke 2023. Merujuk keterangan dari Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (KUKM), koperasi produsen memiliki peran sebagai pengadaan bahan baku, input, atau sarana produksi yang menunjang ekonomi anggota, sehingga anggota memperoleh manfaat koperasi karena para anggota mampu meningkatkan produktivitas dan pendapatannya. Adapun fungsi dari koperasi produsen antara lain: (1) Pembelian ataupun pengadaan input yang diperlukan anggota; (2) pemasaran hasil produksi yang dihasilkan anggota; (3)

proses produksi bersama atau pemanfaatan sarana produksi secara bersama; serta (4) menanggung risiko bersama. Koperasi produsen dapat memberdayakan dan mendorong usaha anggotanya melalui berbagai layanan yang terdapat dalam koperasi tersebut. Unit layanan ini harus dikembangkan mengikuti perkembangan usaha anggotanya.

Berkembangnya berbagai badan usaha, termasuk koperasi pada saat ini membuat adanya suatu urgensi untuk meningkatkan profesionalitas dan konsistensi dalam pengelolaan serta administrasi, terutama dalam bidang pencatatan keuangan atau sistematika akuntansi. Kemampuan ini sangat dibutuhkan untuk mengatur jalannya usaha koperasi, serta melihat berbagai ancaman, perkembangan, dan peluang bisnis koperasi sendiri. Hal tersebut berkaitan erat dengan keputusan manajemen atau pengurus terhadap penggunaan dan alokasi modal koperasi dalam satu periode. Pengurus koperasi bertanggung jawab penuh atas tata kelola seluruh bisnis koperasi, termasuk di dalamnya adalah pengelolaan modal atau sumber dana koperasi agar dapat digunakan secara efektif dan efisien. Dalam menyusun anggaran atau alokasi modal koperasi, pengurus harus mempertimbangkan kesehatan koperasi dengan meninjau pada kinerja keuangan koperasi. Informasi yang dibutuhkan untuk mengambil keputusan alokasi modal dan perancangan anggaran tertuang pada laporan keuangan, sebagai *output* dari proses akuntansi koperasi.

Laporan keuangan merupakan hasil dari proses pencatatan akuntansi yang berisi informasi catatan keuangan perusahaan dalam periode tertentu. Menurut Hery (2012) *dalam* Hendy Widiastoeti (2020), laporan keuangan yaitu serangkaian

proses akuntansi yang digunakan untuk menyampaikan data atau angka keuangan serta aktivitas perusahaan kepada pihak yang berkepentingan. Laporan keuangan dalam satu periode akuntansi dibuat dan disajikan atas realisasi akhir periode perusahaan yang bersangkutan, bertujuan untuk menginformasikan keadaan keuangan perusahaan kepada pihak yang membutuhkan, baik pihak internal maupun eksternal. Laporan keuangan yang telah disajikan dapat menjadi bahan evaluasi, pertimbangan, dan dasar pengambilan keputusan oleh penggunanya. Dengan demikian, laporan keuangan harus menyajikan informasi yang relevan.

Untuk memenuhi standar laporan keuangan yang benar, maka hasil laporan keuangan harus memenuhi *qualitative characteristic* atau karakteristik kualitatif pokok, antara lain (1) dapat dipahami (*understandability*), (2) relevan (*relevance*), (3) keandalan (*reability*), dan (4) dapat diperbandingkan (*comparability*). Laporan keuangan harus disajikan dengan baik dan benar, dalam artian melaporkan keadaan keuangan dengan sejujurnya, apa adanya sesuai dengan kejadian berlandaskan prinsip akuntansi, supaya laporan keuangan dapat dipercaya dan diandalkan, serta bebas dari adanya kecurangan (*fraud*).

Upaya menghindari berbagai penyalahgunaan modal koperasi dan adanya transparansi dalam pengelolaan keuangan koperasi salah satunya adalah diterapkan sistem akuntansi dalam koperasi. Pemerintah pun menyerukan kepada seluruh koperasi agar dapat menyajikan laporan keuangan dengan baik dan benar yang bertujuan untuk mewujudkan koperasi yang dikelola secara profesional dengan adanya penerapan prinsip keterbukaan, transparansi, dan akuntabilitas yang dapat diakui, dipercaya, dan diterima, baik oleh anggota pada khususnya, dan seluruh

masyarakat pada umumnya. Laporan keuangan ini akan bermanfaat apabila informasi yang terkandung di dalamnya dapat membantu dalam memprediksi apa yang akan terjadi di masa mendatang melalui proses perbandingan, evaluasi, dan analisis *trend*.

Keberagaman bisnis dalam berbagai badan usaha tentunya membuat adanya perbedaan kebutuhan informasi transaksi yang tertuang dalam penyajian laporan keuangan. Hal ini dapat memicu adanya keberagaman penyajian yang dikhawatirkan akan menyulitkan pembaca untuk membandingkan informasi keuangan dan menarik kesimpulan. Oleh karena itu, seluruh entitas atau badan usaha harus berpedoman kepada standar akuntansi keuangan yang sesuai dengan badan usaha yang dimilikinya. Urgensi dari adanya standar tersebut terletak pada kebutuhan universal akan keterbukaan dan konsistensi pencatatan keuangan. Di Indonesia, beberapa standar akuntansi keuangan yaitu: (1) Pedoman Standar Akuntansi Keuangan (PSAK), yang harus diterapkan untuk entitas terbuka, atau yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia; (2) Standar Akuntansi Keuangan – Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP), diperuntukkan bagi entitas yang tidak terkait pada akuntabilitas publik; (3) Standar Akuntansi Syariah, bagi entitas yang berprinsip syariah; dan (4) Standar Akuntansi Publik (SAP) untuk penerapan akuntansi dalam entitas sektor publik.

Seluruh UMKM dan koperasi memiliki pedoman standar akuntansi yaitu SAK ETAP, karena berbentuk entitas tertutup dengan kebutuhan modal usaha < 1 miliar, hingga pengguna laporan keuangan nya pun tidak melibatkan para investor asing, atau penanam modal. Berbagai pihak pengguna laporan keuangan dalam koperasi

antara lain anggota, manajer, kreditur, dan masyarakat. SAK ETAP merupakan standar akuntansi untuk badan usaha yang menerbitkan laporan keuangan dengan tujuan umum (*general purpose financial statement*) bagi pengguna eksternal, yaitu pemilik yang tidak terlibat langsung dalam pengelolaan usaha, seperti kreditur dan lembaga pemeringkat kredit. Diterapkannya sistem akuntansi koperasi yang berpacu pada SAK ETAP dapat menciptakan fleksibilitas dalam penyusunan laporan keuangan sebagai *output* dari proses akuntansi. Elemen dan isi kandungan dalam SAK ETAP tidak mengacu pada SAK umum, melainkan berdiri sendiri dengan konsep biaya historis yang mengatur transaksi pada entitas terkait. Kendati demikian, SAK ETAP ini nantinya akan digantikan kedudukannya oleh SAK Entitas Private (SAK EP) pada tanggal 1 Januari 2025. Pergantian standar ini disahkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) Ikatan Akuntan Indonesia pada 30 Juni 2021 lalu.

Laporan keuangan yang diterbitkan oleh koperasi berguna sebagai tolok ukur untuk menghitung profit yang diperoleh, mengetahui penambahan atau pengurangan modal yang dihasilkan, serta meninjau keseimbangan antara aset dan kewajiban koperasi. Oleh karena itu, laporan keuangan koperasi harus disajikan secara lengkap dengan mengacu pada SAK ETAP, yaitu (1) neraca; (2) laporan laba rugi (perhitungan hasil usaha); (3) laporan perubahan ekuitas; (4) laporan arus kas; dan (5) catatan atas laporan keuangan. Pengambilan keputusan atau kebijakan harus didasarkan pada seluruh informasi dalam setiap jenis laporan keuangan, tidak hanya dari profit atau keuntungan bersih koperasi. Hal ini menjadi urgensi untuk melakukan analisis laporan keuangan. Menurut Henry (2015), analisis laporan

keuangan yaitu pembedahan unsur-unsur laporan keuangan dengan menelaah setiap unsur guna mendapatkan gagasan atau pemahaman yang baik atas laporan keuangan tersebut.

Sebagai negara agraris, Indonesia memiliki sumber daya alam berupa bahan pangan nabati yang melimpah. Potensi sumber daya alam berupa lahan pertanian yang luas membuat UMKM yang menjadi mayoritas dikelola masyarakat pun bergerak pada sektor pertanian. Melansir dari Dinas Komunikasi dan Informasi berdasarkan data yang diolah dari Badan Pusat Statistik, sektor pertanian, peternakan, dan pertanian menjadi sektor UMKM terbanyak yang dikelola oleh masyarakat, yaitu sebesar 49%. Selanjutnya, sektor usaha yang kebanyakan diminati oleh masyarakat adalah perdagangan, hotel, dan restoran, yaitu sebesar 28%. Sisanya bergerak pada bidang transportasi dan komunikasi (7%), industri pengolahan (6%), dan jasa lainnya (5%).

Hasil pertanian yang dikelola oleh masyarakat pelaku UMKM selanjutnya disalurkan pada rumah tangga konsumen. Salah satu hasil olahan nabati yang dikonsumsi oleh dominasi masyarakat adalah tempe dan tahu, yaitu hasil olahan kedelai. Maka dari itu, terdapat sebagian masyarakat yang memilih untuk menjadi perajin tempe atau tahu. Merujuk pada data Dinas KUKM Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2023, terdapat sebanyak 426 perajin tempe dan tahu pada domisili Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta.

Koperasi Primer Produsen Tempe Tahu Indonesia Sleman (Primkopti Sleman) merupakan koperasi beranggotakan para perajin tempe tahu Indonesia Sleman.

Sesuai dengan peran koperasi, Primkopti Sleman berusaha untuk menyokong perekonomian anggota dengan cara menyediakan bahan baku berupa kedelai. Hingga akhir tahun 2023, jumlah anggota Primkopti Sleman adalah sebesar 174 orang. Dengan kata lain, sebanyak 41,78% dari seluruh perajin tempe tahu di Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan anggota Primkopti Sleman. Primkopti Sleman telah bergabung dan berafiliasi dengan koperasi sekunder, yaitu pusat koperasi tempe tahu Indonesia (Puskopti) dan Gabungan Koperasi Produsen Indonesia (Gakoptindo). Primkopti Sleman adalah koperasi sektor riil yang bergerak dalam bidang perdagangan, yaitu penyaluran kedelai kepada anggotanya. Meningkatnya kebutuhan kedelai sebagai bahan baku produksi tempe dan tahu, serta minimnya sumber edukasi keterampilan kepada produsen tempe tahu menjadi latar belakang berdirinya Primkopti Sleman pada tanggal 19 Desember 1980 silam.

Primkopti Sleman sendiri memiliki peran sebagai wadah berhimpunnya produsen tempe tahu di wilayah Kabupaten Sleman. Tujuan dari Primkopti ini yaitu meningkatkan kesejahteraan produsen tempe tahu, menambah lapangan pekerjaan, meningkatkan pengetahuan dan keterampilan produsen tempe tahu agar memproduksi tempe tahu sesuai dengan standar pengolahan pangan, serta meningkatkan kesadaran dan pengetahuan produsen tempe tahu, untuk mengenal organisasi dan menjalankan usaha dengan tata kelola/manajemen yang terstruktur.

Sayangnya, terjadi tata kelola sistem akuntansi yang terlewatkan oleh koperasi, bahwa penyajian laporan keuangan koperasi tidak berpedoman pada SAK ETAP. Dalam tahap wawancara, sekretaris Primkopti menyatakan bahwa penyusunan

laporan keuangan hanya berdasarkan pada pengetahuan dan keterampilan pengurus, serta belum mengetahui banyak hal-hal yang terkandung pada pedoman SAK ETAP. Selain itu, Dinas Koperasi dan UMKM setempat tidak menyelenggarakan pelatihan penyusunan laporan keuangan dan pemahaman standar akuntansi. Fenomena tersebut berdampak pada ketidak-lengkapan laporan keuangan yang tersaji, yaitu laporan neraca, laba rugi, dan catatan atas laporan keuangan.

Pada pemaparan fenomena tersebut, dapat disimpulkan bahwa terdapat adanya perbedaan perlakuan akuntansi dalam sisi penyajian laporan keuangan pada Primkopti Sleman dengan Standar Akuntansi ETAP. Perlu adanya perubahan sistem akuntansi agar lebih sistematis dan mencapai pada *qualitative characteristic* laporan keuangan, sesuai dengan kaidah akuntansi. Patuhnya penyusunan laporan keuangan dengan SAK ETAP dapat meningkatkan kualitas informasi koperasi, serta berdampak pada kemajuan dan perkembangan koperasi secara jangka panjang.

Tolok ukur fenomena tersebut terdapat pada penelitian terdahulu, di antaranya dalam jurnal (Baiq Nada F.S, Elin Erlina Sasanti, Zuhrotul Isnaini, 2022) disimpulkan bahwa dalam penerapan akuntansi berdasarkan SAK ETAP di Koperasi Syariah Sepakat Sejahtera dan Koperasi Simpan Pinjam Dharma Sari Bumi Pagutan di Kota Mataram masih berada pada fase pengembangan. Terlihat pada belum disajikannya pos-pos properti investasi, penyajian laporan laba rugi investasi dengan metode ekuitas belum diterapkan, serta dalam neraca belum disajikan pos kewajiban pajak. Selanjutnya, dalam jurnal (Nur Hafidzah, Eva Sriwiyanti, Mahaitin H. Sinaga, 2022) pada Koperasi Karyawan PTPN IV Kebun

Bah Jambi, disimpulkan bahwa penyajian laporan keuangan koperasi tersebut belum tersaji pos-pos tertentu dalam neraca, di antaranya: tidak terdapatnya akun penyajian aset tetap tidak berwujud, akun properti investasi, dan akun aset kewajiban pajak. Fenomena ini pun diteliti pada jurnal (Silmi Mursidah dan Juliana Nasution, 2022) yang mana di Koperasi Tunas Wira Mandiri, ditarik kesimpulan bahwa koperasi tersebut terdapat ketidaksesuaian penyajian laporan keuangan dengan pedoman SAK ETAP. Pada laporan arus kas, terdapat akun yang tidak seharusnya disajikan dalam aktivitas pendanaan, yaitu akun cerukan bank yang seharusnya diklasifikasikan dalam aktivitas operasi.

Berdasarkan latar belakang dan fenomena yang telah dipaparkan, bahwa terdapat urgensi dalam penerapan SAK ETAP pada penyajian laporan keuangan di koperasi, karena berpengaruh pada kualitas informasi yang dibutuhkan oleh para pengguna laporan keuangan, termasuk di dalamnya adalah kelengkapan laporan yang disajikan. Acuan SAK ETAP memberi dorongan supaya koperasi dapat bertindak lebih efektif dan efisien dalam aktivitas akuntansi untuk menyusun laporan keuangan. Oleh karena itu, penting untuk menilai kesesuaian seluruh penyajian laporan keuangan oleh Primkopti Sleman dengan SAK ETAP, maka penelitian ini diangkat dengan judul **“Analisis Perbandingan Penyajian Laporan Keuangan Berdasarkan SAK ETAP Studi Kasus Primer Koperasi Produsen Tempe Tahu Indonesia Sleman”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Merujuk dari uraian fenomena pada latar belakang, dapat ditarik identifikasi masalah pada penelitian, antara lain:

1. Bagaimana proses akuntansi yang diterapkan pada Primer Koperasi Produsen Tempe Tahu Indonesia (Primkopti) Sleman?
2. Bagaimana kesesuaian penyajian akun aset, liabilitas, dan ekuitas pada laporan posisi keuangan (neraca) di Primkopti Sleman dengan acuan SAK ETAP?
3. Bagaimana kesesuaian penyajian akun penjualan, pendapatan lain-lain, dan beban pada laporan perhitungan hasil usaha di Primkopti Sleman dengan acuan SAK ETAP?
4. Bagaimana kesesuaian penyajian laporan perubahan ekuitas di Primkopti Sleman dengan acuan SAK ETAP?
5. Bagaimana kesesuaian penyajian laporan arus kas di Primkopti Sleman dengan acuan SAK ETAP?
6. Bagaimana kesesuaian penyajian catatan atas laporan keuangan Primkopti Sleman dengan acuan SAK ETAP?
7. Bagaimana Penyajian Laporan Promosi Anggota oleh Primkopti Sleman?

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian identifikasi permasalahan, maka maksud dan tujuan penelitian ini antara lain sebagai berikut.

1.3.1 Maksud Penelitian

Penelitian ini bermaksud untuk menambah pemahaman, mempelajari penerapan akuntansi di lapangan, memperoleh data, mengetahui informasi pada Primer Koperasi Tempe Tahu Indonesia Sleman, terutama pada kesesuaian penyajian laporan keuangan yang dihasilkan berdasarkan Standar Akuntansi Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik yang berlaku.

1.3.2 Tujuan Penelitian

Tujuan dari pelaksanaan penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut.

1. Mengetahui sistem akuntansi yang diterapkan pada Primer Koperasi Tempe Tahu Indonesia Sleman.
2. Menilai kesesuaian penyajian akun aset, liabilitas, dan ekuitas pada laporan posisi keuangan (neraca) di Primkopti Sleman dengan acuan SAK ETAP.
3. Menilai kesesuaian akun penjualan, pendapatan lain-lain, dan beban yang disajikan dalam laporan perhitungan hasil usaha di Primkopti dengan pedoman SAK ETAP.
4. Menilai kesesuaian penyajian laporan perhitungan perubahan ekuitas di Primkopti dengan pedoman SAK ETAP.
5. Menilai kesesuaian penyajian laporan arus kas ekuitas di Primkopti dengan pedoman SAK ETAP.
6. Mengetahui penyajian laporan promosi anggota Primkopti Sleman.

1.4 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan memiliki kegunaan baik secara teoritis, maupun secara praktis. Kegunaan teoritis merupakan manfaat jangka panjang yang diperoleh untuk mengembangkan teori atau kajian akademis, sedangkan kegunaan praktis adalah kegunaan yang berdampak secara langsung terhadap komponen yang terdapat di lapangan.

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberi wawasan dan informasi, menambah pengetahuan, khususnya bagi peneliti, dan umumnya bagi seluruh pembaca. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya untuk mengkaji lebih dalam lagi pada topik Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan mampu berkontribusi untuk pemikiran yang berguna bagi berbagai pihak yang dapat diuraikan sebagai berikut.

1. Bagi Koperasi

Penelitian ini diupayakan untuk menjadi bahan evaluasi yang berpacu pada informasi dan masukan positif yang bersifat membangun. Dengan demikian, koperasi mampu meningkatkan kualitas laporan keuangan ke arah penyempurnaan pada penerapan standar yang berlaku.

2. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan mampu memperluas wawasan dan menambah pemahaman peneliti mengenai standar akuntansi keuangan, khususnya SAK ETAP. Selain itu, penelitian ini memiliki kegunaan bagi peneliti, agar dapat meninjau langsung mengenai sistem akuntansi yang diterapkan di lapangan.

3. Bagi Universitas

Hasil penelitian ini diharapkan memiliki kegunaan untuk pengajaran kepada mahasiswa mengenai Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik secara lebih mendalam, supaya mahasiswa mendapatkan ilmu secara teori dan terapan terhadap standar akuntansi tersebut.